

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Manajerial Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangandaran Perspektif Siyasa Maliyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana manajerial di kabupaten Pangandaran adalah pemerintah daerah memiliki kebijakan dengan memberikan sarana dan prasarana untuk nelayan melakukan transaksi di tempat pelelangan ikan (TPI) dan Pasar ikan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan di Pangandaran tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah total 10 TPI. untuk pelaku usaha perikanan dibuat program NIB (Nomor Induk Berusaha), dan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Sektor Perikanan dan Kelautan).
2. Kendala dan hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam sektor perikanan adalah masih adanya nelayan yang melakukan transaksi diluar tempat pelelangan ikan, dan menjual hasil tangkapan kepada para tengkulak. Karena seharusnya nelayan melakukan transaksi di tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2022. Hal tersebut menghambat realisasi dari retribusi izin usaha perikanan. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya sosialisasi dan survey lapangan kepada para nelayan.
3. Berdasarkan perpspektif Siyasa Maliyah kabupaten Pangandaran mengeluarkan kebijakan dengan adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang retribusi izin usaha perikanan dan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI), merupakan sebuah bentuk dari intervensi dari tujuan negara untuk menciptakan ekonomi dengan menggunakan sumber daya alam

dengan optimal namun dengan tetap menjaga keseimbangan alam dengan memperhatikan syariat dan aturan yang berlaku dan suatu tanggung jawab negara dalam membentuk suatu kebijakan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana mencari informasi atau pengetahuan tentang peningkatan pendapatan asli daerah melalui manajerial retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran. Pada dasarnya kabupaten Pangandaran menjadi wilayah perairan yang cukup luas untuk di optimalkan menjadi lahan perekonomian bagi masyarakat dan daerah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran atrau sumbangan pemeikiran dan masukan terhadap upaya dalam menghadapi kendala dan hambatan pada retribusi sektor perikanan di kabupaten Pangandaran.
3. Penelitian ini juga diaharpakan menjadi acuan untuk pemerintah daerah kabupaten Pangandaran melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada untuk mencapai tujuan, dan pentingnya dalam membuat kebijakan untuk memperhatikan kemaslahatan umat. Dan kebijakan yang dibua perlu memperhatikan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat nelayan.